



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL ALIM**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN**
3. NHK : **722014**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.130.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/48 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 439 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 165 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
4. Tanah Seluas 2129 m² di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 520.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 202.000.000

1. MOBIL, MARCH NISSAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 77.000.000
2. MOBIL, HONDA /FREED MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 33.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 5.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.370.500.000

III. HUTANG Rp. 415.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.955.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.